

Pendampingan Pengembangan Akuntansi Masjid Berdasarkan Psak 45 di Kabupaten Kudus

¹Ita Rakhmawati, ¹Fina Tri Wahyuni, ¹Suparwi

¹IAIN Kudus

email : ¹itarakhmawati@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan menganalisis permasalahan sistem keuangan masjid, merancang desain akuntansi keuangan masjid yang selaras dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mengimplementasikan dan pendampingan dilakukan dengan penerapan sistem akuntansi masjid.

Pendekatan yang digunakan adalah *Community Development Practice* yang diadaptasi dari Vincent II, J.W. Jack merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan pengembangan masyarakat yang diarahkan pada peningkatan akses guna mencapai kondisi yang lebih baik. *Community Development* dengan tiga persyaratan yaitu berbasis pada masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Langkah-langkah kegiatan yaitu pembentukan tim, perumusan tujuan, identifikasi stakeholder, pengumpulan dan analisis kebutuhan, penentuan prioritas dan solusi masalah, persiapan, implementasi, pendampingan, review dan evaluasi serta penentuan kebutuhan dan sasaran baru

Hasil pengabdian menunjukkan terdapat temuan di lapangan bahwa minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan masjid, terbatasnya sumber data keuangan yang terhimpun, minimnya sarana prasarana yang mendukung, tidak adanya tenaga ahli yang berkompeten. Berdasarkan temuan tersebut prioritas penyelesaian yang utama adalah melalui workshop, pelatihan dan pendampingan aplikasi akuntansi masjid bagi takmir masjid. Materi pelatihan mencakup siklus akuntansi mulai dari tahap identifikasi akun, penyusunan jurnal, penyusunan buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan neraca lajur dan penyusunan laporan keuangan. Hasil pendampingan menghasilkan dua hal yaitu entitas masjid telah dapat mengidentifikasi aset masjid yang selama ini banyak yang belum teridentifikasi dan terinventarisir. Yang kedua entitas masjid dapat menghasilkan laporan keuangan entitas nirlaba berdasarkan PSAK 45 meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas yang dapat diakses oleh stakeholder. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan antara lain sebagian SDM dengan usia non produktif yang lebih gagap teknologi, terbatasnya data keuangan dan aset yang tersedia, sebagian besar masjid hanya memiliki pencatatan uang masuk dan keluar dengan sistem *single entry* dan minimnya sarana operasional pendukung (seperti komputer, printer) yang dimiliki masjid.

Kata Kunci: Pendampingan, Akuntansi Masjid, PSAK 45.

1. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi pada era sekarang dirasakan sangat pesat sekali. Akuntansi awalnya diterapkan pada sektor swasta yang bersifat *profit oriented*. Namun perkembangan budaya dan kesadaran masyarakat, akuntansi mulai berkembang ke arah sektor publik yang bersifat *non profit oriented*. Kesadaran lembaga lembaga tersebut tidak terlepas dari kebutuhan akan pengelolaan sistem keuangan yang lebih transparan,

akuntanbel dan komparatif. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada para pemakai laporan keuangan¹. Lalu dimanakah hubungan antara akuntansi dan rumah ibadah khususnya masjid dalam hal ini?

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki perkembangan masjid yang cukup signifikan. Data dari Direktorat Agama Islam dan Syariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI menyebutkan terdapat 258.378 masjid di Indonesia². Pengelolaan masjid secara tepat akan memberikan *positive multiplier effect* bagi perkembangan masyarakat. Salah satu pilar dalam rangka mewujudkan pengelolaan masjid yang tepat diperlukan pengelolaan keuangan yang solid. Rumah ibadah pada umumnya dan masjid pada khususnya merupakan salah satu lembaga yang menerima dan mengelola dana dari pihak luar. Jadi sudah selazimnya masjid harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan keuangannya kepada *stakeholder*.

Akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal semata, tetapi lebih dari itu diperlukan akuntabilitas vertikal sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Namun ini bukanlah persoalan mudah dan sederhana untuk menyandingkan masjid sebagai sarana peribadatan yang bersifat transsendental dengan akuntansi yang lebih bersifat material. Disinilah tantangan akuntansi untuk mampu diterima di lingkungan masyarakat sebagai salah satu bentuk kebutuhan akan pelaporan yang menghasilkan transparansi keuangan. Disinilah urgensi dari pengembangan akuntansi masjid berbasis pengabdian masyarakat dilaksanakan.

2. Kajian Pustaka

Masjid merupakan salah satu entitas yang mendapatkan sumber dana utama dari sumbangan masyarakat berupa zakat, infak maupun sodaqoh. Faktor keikhlasan *Lillahi Ta'ala* tanpa adanya unsur riya adalah faktor utama donatur dalam memberikan sumbangan untuk masjid. Namun demikian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masjid menjadi salah satu unsur yang diperhatikan pada era saat ini. Masjid dengan akuntabilitas yang tinggi cenderung lebih mampu menggambarkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelolanya selama ini kepada stakeholder. Hal inilah yang dapat meningkatkan motivasi stakeholder untuk memberikan donasi.

Signalling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya entitas mampu memberikan sinyal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Brigham dan Houston, *signalling theory* merupakan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberi informasi bagi investor tentang bagaimana pandangan investor mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang³. Hal ini pula yang terjadi pada entitas nirlaba termasuk masjid di dalamnya.

Laporan keuangan yang dihasilkan masjid merupakan signal yang akan ditangkap oleh stakeholder di luar. Jika signal tersebut positif (*good news*) dalam artian laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus masjid selama ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik, mampu menggambarkan pencapaian dan target ke depannya akan memotivasi stakeholder dalam berpartisipasi memberikan donasi dan menyalurkan sodaqohnya melalui masjid tersebut. Demikian pula sebaliknya jika signal tersebut negatif (*bad news*) dalam artian laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengurus tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik bahkan tidak memberikan pelaporan akan menyebabkan tanda tanya dan ketidakpercayaan publik terhadap pengurus. Hal inilah yang menyebabkan sulitnya

¹ _____, "PSAK 45 Entitas Nirlaba" (<http://iaiglobal.or.id/>, diakses pada 4 Agustus 2019)

² _____, "Info Masjid" (<https://bimasislam.kemenag.go.id/>, diakses 10 Agustus 2019)

³ Eugene F. Brigham dan Joe F. Houston, Manajemen Keuangan, (Jakarta : Erlangga, 2001)

masjid memperoleh dana ke depannya. Hal tersebut bukan hanya memberikan efek jangka pendek yaitu terbatasnya dana masjid tetapi juga akan menyebabkan kesulitan dalam usaha mengoptimalkan peran masjid sebagai pusat aktivitas ummat.

Secara terminologi masjid berasal dari kata sajada sujudan yang berarti taat atau patuh (Ayub : 96). Rumah ibadah (dalam hal ini masjid) sebenarnya memiliki arti penting dan strategis dalam masyarakat. Diakui atau tidak masjid mampu menjadi pusat aktifitas (*center of activity*) dari masyarakat. Menurut Mustofa (2007) terdapat beberapa fungsi masjid diantaranya adalah sebagai saran konsultasi keagamaan, keluarga, maupun masalah sosial, sarana pengembangan dan penguatan pendidikan masyarakat, sarana pengembangan bakat dan keterampilan masyarakat, sarana pengentasan kemiskinan, sarana meringankan beban orang kurang mampu, sarana pembinaan generasi muda, sarana mitra pengembangan perekonomian masyarakat dan sarana menyehatkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk melakukan manajemen masjid diperlukan alat organisasional di bidang pengelolaan keuangan yaitu akuntansi. American Accounting Association dalam Yusuf (2012) menyatakan akuntansi sebagai sebuah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam prinsip ekonomi syari'ah, Tauhid Illahiyah merupakan rujukan tertinggi sehingga bentuk pertanggungjawaban yang utama adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan dengan demikian tidak ada tempat untuk menyimpang dan kebohongan. Disinilah peran akuntansi masjid sebagai bentuk akuntabilitas horizontal terlebih lagi vertikal yang bersifat transendental.

Menurut Bastian (2007), masjid seperti halnya lembaga publik lainnya juga mengalami tekana untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomis dan biaya sosial serta dampak positif dan negatif dari kegiatan yang dilakukannya. Menurut Hidayat (2018), akuntansi nirlaba mencakup poin sebagai berikut:

1. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa memupuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali.

Menurut PSAK 45 tentang entitas nirlaba, laporan keuangan yang diperlukan untuk akuntansi masjid meliputi:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, yaitu laporan yang digunakan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan, adalah laporan yang digunakan untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, merupakan laporan yang digunakan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
4. Catatan atas laporan keuangan yang terbagi menjadi tiga bagian, meliputi catatan A berisi pernyataan entitas atas aset terikat dan atau aset tidak terikat. Catatan B berisi penyajian atas aset terikat temporer dan catatan C berisi penyajian atas aset terikat permanen.

Sebagai sebuah sistem, akuntansi dilakukan melalui beberapa tahapan. Menurut IAI (2018) alur akuntansi masjid meliputi sebagai berikut:

1. Penyiapan dokumen atau data keuangan dan informasi lain yang diperlukan
2. Penyusunan jurnal
3. Posting ke buku besar
4. Penyusunan neraca saldo
5. Penyusunan laporan keuangan

Hasil penelitian Andarsari (2016) menunjukkan bahwa pada pengaplikasiannya, akuntansi masjid yang digunakan lebih banyak dengan pendekatan *cash basis* yaitu mengakui adanya penerimaan dan pengeluaran saat kas benar besar telah diterima dan dibayarkan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak entitas masjid yang belum bisa dan belum membuat laporan keuangan tersebut. Penelitian Ahyaruddi dkk (2017) menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian pengelolaan keuangan masjid dirasakan sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kendala yang dihadapi adalah pelatihan masih sebatas pada materi dasar belum sampai pada upaya pembuatan *software* sistem keuangan masjid secara *on line*. Disamping itu hambatan yang dihadapi adalah masih terbatasnya cakupan pendampingan yang terakomodir. Penelitian Hanafi (2015) menunjukkan bahwa meski sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pelaporan keuangan masjid, namun praktik akuntansi yang digunakan di masjid sampai saat ini masih sangat sederhana. Tetapi disisi lain para pengurus sangat menjaga amanah yang diberikan para jamaah untuk mengelola keuangan masjid. Pencatatan keuangan dilakukan selama ini masih sebatas dengan menginventarisir besarnya kas masuk dan kas keluar serta menentukan jumlah saldo kas. Penelitian Kadri (2017) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi microsoft exceel dapat mempermudah pengurus dalam rangka membuat sistem pencatatan keuangan berdasarkan PSAK 45. Pengurus hanya perlu memasukkan data transaksi keuangan saja, dan laporan keuangan sudah bisa dihasilkan dari sistem. Penggunaan sistem aplikasi ini juga berfungsi sebagai peneragaman proses pelaporan keuangan masjid..

Terdapat berbagai perbedaan pengabdian ini dengan penelitian dan pengabdian yang terdahulu. Salah satu yang pertama adalah dilihat dari objek dampingan. Objek dampingan adalah masjid di Kabupaten Kudus, yang sampai dengan hari ini pengabdian ketahuinya belum pernah ada pendampingan pelatihan akuntansi terhadap pengelolaan keuangan masjid di kabupaten tersebut. Yang kedua untuk materi pelatihan tidak hanya memperhatikan aspek akuntansi masjid berdasarkan PSAK 45 untuk entitas nirlaba tetapi pengurus juga memperhatikan aspek kearifan dan budaya lokal, dan moderasi keberagaman sehingga dengan harapan sistem yang dihasilkan nantinya mudah diterima dan digunakan secara berkelanjutan. Sisi perbedaan yang ketiga dengan telah dibuatnya sistem informasi keuangan yang tepat sehingga pengurus keuangan masjid dapat mengoptimalkan dana yang dikelola. Dalam hal ini pengurus dan pengurus akan berupaya menemukan desain pengoptimalan keuangan masjid untuk dapat memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan demikian harapan bahwa masjid sebagai sarana memajukan peradaban islam bukan hanya semata tempat ibadah dapat tercapai.

3. Metodologi

Khalayak sasaran program pengabdian ini adalah masjid di Kabupaten Kudus dengan sumber daya manusia utamanya pada takmir masjid (ketua, bendahara atau sekretaris) yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan keuangan. Karena banyaknya jumlah masjid dan memiliki kebutuhan yang sama, dipilihlah sembilan masjid sebagai *pilot project*. Harapan kedepannya kesembilan masjid ini mampu menjadi contoh untuk masjid-masjid lain di sekitarnya. Berikut adalah kesembilan masjid sebagai lokus pengabdian ini. Masjid Baiturrahman Tanjung Karang Undaan Kudus, Masjid Darussalam Barisan Jati Wetan Kudus, Masjid Al Karim, Tanjung Karang Undaan Kudus, Masjid Roudhotul Jannah Jepang Mejobo Kudus, Masjid Sabilul Muttaqin Jepang

Pakis Jati Kudus, Masjid Darul Ummah Jepang pakis jati Kudus, Masjid Al Arif Jepang pakis jati Kudus, Masjid Wali Al Makmur Jepang Mejobo Kudus, Masjid Attaqwa Gribog Gebog Kudus

Pendekatan yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah *Community Development Practice* yang diadaptasi dari Vincent II, J.W. Jack (2009). *Community Development* merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan pengembangan masyarakat yang diarahkan pada peningkatan akses guna mencapai kondisi yang lebih baik. Pada pendekatan ini setidaknya terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi yaitu berbasis pada masyarakat *community based*, *local resource based* dan *sustainable*. Sehingga pengabdian ini didesain dengan pendekatan pelatihan yang berkelanjutan. Secara teratur tahapan pengabdian ini dimulai dari pembentukan tim hingga menentukan kebutuhan dan sasaran baru sebagaimana digambarkan dalam diagram alir berikut ini:

Gambar 1.
Diagram Alur Model Community Development Practice (diadaptasi dari Vincent II, 2009)



4. Hasil dan Pembahasan

Persebaran umat Islam di Kabupaten Kudus yang tinggi, diikuti pula dengan persebaran masjid sebagai sarana ibadahnya. Kabupaten Kudus memiliki 714 masjid yang tersebar ke dalam sembilan kecamatan. Pembentukan tim merupakan langkah awal pelaksanaan program pengabdian ini. Tim ini terdiri dari delapan orang dengan berbagai latar belakang keilmuan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan dengan harapan mampu menjawab kebutuhan dari mitra dampingan ke depannya. Latar belakang itu antara lain dari bidang keagamaan (fikih), ilmu ekonomi, ilmu akuntansi dan manajemen zakat wakaf.

Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah guna meningkatkan kualitas takmir dalam bidang manajemen /pengelolaan keuangan melalui akuntansi masjid. Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Dewan Kesejahteraan Masjid, generasi muda dalam hal ini diwakili dari IPNU dan masyarakat sekitar lingkungan masjid yang memiliki kepentingan dan kebutuhan terhadap pengelolaan masjid.

Hasil dari survei lapangan menunjukkan data terkait keuangan sebagai berikut. Pertama, dari aspek sumber dana, sumber dana pada kesembilan masjid tersebut umumnya berasal dari masyarakat umum baik dalam bentuk infak, shodaq, jariah dan juga sumbangan. Terkait dengan sistem pencatatan keuangan yang selama ini dilakukan,

pengelola masih memiliki kendala yaitu minimnya pengetahuan. Sehingga yang terjadi adalah masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* dalam bentuk arus kas sederhana. Selama ini, entitas hanya menuliskan total jumlah uang masuk dan uang keluar dalam satu akun saja. Dengan demikian tolak ukur keberhasilan dari pengelolaan keuangan hanya menggunakan indikator besar kecilnya saldo kas yang terkumpul. Dampak dari pelaporan ini menjadikan aktivitas penggunaan kas menjadi tidak bisa digambarkan secara jelas. Hal ini berdampak pada sisi perencanaan keuangan ke depannya menjadi kurang terarah.

Pada sudut pandang neraca, hampir semua masjid belum memiliki neraca atau laporan posisi keuangan. Padahal laporan ini berfungsi untuk menggambarkan posisi keuangan entitas dari aspek aset dan aset neto yang dimilikinya. Bahkan untuk sekedar daftar aset beserta nilainya pun belum ditemukan. Hal tersebutlah yang sering menjadi akar masalah hilangnya aset masjid. Hal tersebut disinyalir karena pengurus mengalami kesulitan dalam menentukan nilai aset yang dimiliki oleh masjid baik untuk aset bergerak ataupun tidak bergerak.

Beberapa permasalahan keuangan lain yang dialami oleh lokus dampingan adalah minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan masjid, terbatasnya sumber data keuangan yang terhimpun, minimnya sarana prasarana yang mendukung, tidak adanya tenaga ahli yang berkompeten. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis kebutuhan (*need assessment*) di lapangan yang diperlukan oleh langkah awal yang dibutuhkan pengurus masjid adalah pengetahuan konsep dan praktik terkait pengelolaan keuangan masjid. Menjawab kebutuhan tersebut, salah satu upaya penyelesaiannya adalah dengan memberikan pelatihan serta pendampingan akuntansi masjid terhadap para takmir.

Tahapan persiapan yang paling utama adalah merancang sistem akuntansi untuk masjid. Berikut adalah alur penyusunan desain akuntansi masjid: merancang daftar akun, neraca saldo awal, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur dan merancang laporan keuangan. Setelah tahap perancangan dilakukan tahap implementasi kegiatan pengabdian dengan agenda pelatihan dan workshop. Kegiatan ini dilakukan dengan sistem klasikal Pelaksanaan workshop dilakukan dalam tiga tahapan. Tahap pertama, dilakukan paparan materi dan diskusi terkait dengan konsep moderasi keberagaman. Pada tahap kedua materi yang disampaikan adalah terkait gamran umum dan teori akuntansi masjid. Tahap ketiga dari kegiatan workshop dan pelatihan ini adalah praktikum (simulasi).

Setelah diberikan workshop dan pelatihan secara klasikal, tahap berikutnya dilanjutkan dengan pendampingan terhadap peserta secara personal dengan cara mengunjungi setiap lokus dampingan. Selain agar lebih optimal pendampingan ini juga berfungsi untuk memastikan kondisi yang terjadi di lapangan sesuai dengan pencatatan yang dilakukan. Pada tahap ini terlihat jelas bahwa kondisi dari masing masing dampingan berbeda beda. Terdapat dampingan yang bisa dengan cepat menyerap serta mengaplikasikan penyusunan laporan keuangan. Tetapi disisi lain terdapat dampingan yang harus pelan pelan dalam pendampingan karena dianggap sebagai ilmu baru.

Tahap review dan evaluasi dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Wawancara kepada peserta dilakukan untuk mengetahui persepsi, kendala dan hambatan yang dialami selama proses berlangsung. Kepada masyarakat sekitar untuk mengetahui persepsi dan tanggapan terhadap program yang telah berjalan dan harapan di masa yang akan datang. Observasi dilakukan untuk memastikan laporan keuangan sebagai output dari kegiatan yang telah dihasilkan benar benar sudah dan dapat dihasilkan. Penentuan kebutuhan dan sasaran baru Salah satunya adalah dampingan masih terbata bata dalam menjalankan siklus akuntansi tersebut sehingga terutama jika terdapat transaksi luar biasa. Temuan lain sebagai masukan bagi langkah berikutnya adalah pelibatan generasi muda (mileneal) yang lebih melek teknologi dalam pengembangan sistem akuntansi

masjid. Dengan demikian proses *transfer knowledge* sistem akuntansi masjid dari pengurus lama ke pengurus baru bisa terus teregenarasi dengan lancar.

Namun demikian terdapat faktor pendukung keberhasilan program pengabdian ini antara lain: tingginya minat (kemauan) serta semangat dari peserta untuk belajar memahami dan mengaplikasikan sistem akuntansi masjid. Hal ini dilihat dari konsistensi peserta untuk mengikuti seluruh tahapan workshop baik teori maupun praktik serta pendampingan. Sistem komunikasi yang terbangun intens dan keluargaan antara tim dengan peserta memudahkan proses pendampingan. Disamping faktor pendukung, masih terdapat faktor penghambat antara lain: sebagian sumber daya manusia di masjid masuk kategori usia tua. Kedua terbatasnya data keuangan dan aset yang selama ini dimiliki masjid. Sebagian besar masjid hanya memiliki pencatatan uang masuk dan keluar dengan sistem *single entry* tanpa disertai dengan bukti transaksi. Demikian pula terhadap aset yang dimiliki oleh pihak masjid, masih belum terinventarisir dengan baik dan lengkap. Ketiga, ketidakadaan sarana operasional pendukung (seperti computer, printer) yang dimiliki masjid.

5. Penutup

a. Simpulan

Program kegiatan pengabdian masyarakat berupa Pendampingan Pengembangan Akuntansi masjid merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan takmir masjid dalam pengelolaan keuangan masjid melalui penerapan akuntansi. Hal tersebut dilatarbelakangi meningkatnya kesadaran stakeholder terhadap akuntabilitas entitas nirlaba dalam hal ini masjid. Meskipun belum sampai tahap sempurna, tetapi pengabdian ini telah mampu menghasilkan laporan posisi keuangan masjid yang menggambarkan keadaan aset yang dimiliki oleh masjid. Hal ini sangat penting dalam rangka mengatasi permasalahan yang sering terjadi yaitu hilangnya aset masjid karena tidak teridentifikasi. Yang kedua, masjid juga telah mampu menghasilkan sistem pencatatan *double entry* yang lebih dapat memberikan gambaran perjalanan kas sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan masa yang akan datang

b. Saran

Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sebagai *pilot project* diharapkan tidak berhenti sampai disini. Tetapi perlu dilakukan kelanjutan mengingat jumlah masjid yang tersebar di wilayah Kudus cukup besar. Bagi peserta, diharapkan kemampuan yang telah dimiliki dapat di tularkan pada generasi takmir berikutnya, sehingga sistem yang sudah berjalan dapat dijaga kontinuitasnya.

Daftar Pustaka

- Ahyaruddi, Muhammad et all. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Pekan Baru*. Universitas Muhammadiyah Riau. Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri Volume 1 Nomor 1 Mei 2017 ISSN:2550- 0198.
- Andarsari, Pipit Rosita. 2016. *Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Entitas Masjid)*. Universitas Kadiri. Jurnal Ekonika Volume 1 Nomor 2 September 2016.
- Ayub, Mohammad E. 1996. *Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus*, Yogyakarta: Gema Insani Press.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Erlangga
- Eman Suherman, *Manajemen Masjid: Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012), hlm. 61.
- Hanafi. 2015. *Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Study Empiris Pada Masjid Nurusy Syifa Surakarta)*. Skripsi.fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamaddiyah Surakarta.
- Hidayat, Nur. 2018. *Akuntansi Masjid*. Bandung: IAI Wilayah Jawa barat.
- ,2010. PSAK 45 Pelaporan Entitas Nirlaba. Jakarta : IAI.

Kadri, Khaerul Shaleh Putra. 2017. *Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Sesuai dengan PSAK 45 Pada Masjid Raya Al Munawwaroh Menggunakan Aplikasi Komputer Microsoft Exceel*. Skripsi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang.

Kemenag. Data Masjid. diperoleh 23 agustus 2018, dari <https://bimasislam.kemenag.go.id/infomasjid/masjid>.

KudusKab. Kudus Dalam Angka 2015. diperoleh 23 Agustus 2018 dari <https://www.kuduskab.go.id/arsip/pdf/kda2015.pdf>.

Mustofa, Budiman. 2007. *Manajemen Masjid*. Surakarta: Ziyad Visi Media.

Pawar, M. (2014) *Social and Community Development Practice*. New Delhi: SAGE Publications.

Untoro, Wisnu. 2010. "Kepublikan sebagai Pemoderasi Pengaruh Perencanaan Strategik pada Kinerja Organisasional". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Vincent II, J. W. (Jack) (2009) "Community development practice," in Rhonda, P. dan Pittman, R. H. (ed.) *An Introduction to Community Development*. New York: Routledge, hal. 58–74.

Yusuf, Al Haryono, 2012. *Dasar Dasar Akuntansi*, STIE YKPN: Yogyakarta.